

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KUTAI KARTANEGARA

Arfiati Arifin¹, Titin Ruliana², Ida Rachmawati³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Arfiati0503@gmail.com

Keywords :

Accounting, public sector, Fixed asset

ABSTRACT

Utilization regional property is one the problems often occurs in every government agency because of a lack of understanding and development in implementing its implementation well. The aim to be achieved in this study is to analyze the management fixed assets in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Kutai Kartanegara.

The method used is a statement of applicable government standards, a comparative method of research that compares the management of fixed asset management institutions, by the state with government accounting standards No. According to Dean J. Champion. Management of fixed assets in financial management bodies and regional assets, state cards are matched to fit 87.1% and tasting hypotheses, the hypothesis is rejected because it complies with government accounting standards (PSAP) No. 07.

While the use of fixed assets in BPKAD is not fully maximized because it only uses use and lease loans. Fixed assets reginal property is carried out by the asset sector in the Regional Financial and Asset Management Agency Kutai Kartanegara card as management assistant in accordance with government accounting standards No. 07. Concerning fixed assets but not fully maximized, such as utilization in financial institutions and management regional assets are limited to leasing and borrowing

PENDAHULUAN

Aset tetap sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintah karena aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintah itu sendiri.

Pengadaan suatu aset tetap disesuaikan dengan aktivitasnya. Akuntansi aset tetap pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2005 dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap. PSAP No. 07 mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara meliputi: Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penghapusan, inventarisasi, Dokumentasi, Pemeliharaan.

Beberapa proses pengelolaan barang milik daerah penulis hanya meneliti proses dan pemanfaatan barang milik daerah, karena pemanfaatan barang milik daerah merupakan salah satu dasar masalah yang sering terjadi dalam setiap instansi pemerintah karena kurangnya pemahaman dan pengembangan dalam menjalankan pelaksanaannya dengan baik dan benar. Permasalahan yang terjadi saat ini di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara pada sub bidang aset tetap bagian pemanfaatan misalnya, bangunan yang seharusnya tidak dibangun malah dibangun sehingga tidak dimanfaatkan, hal tersebut menyebabkan adanya pemborosan dalam pengeluaran yang tidak terlalu penting.

Akuntansi Menurut Abdul Halim (2008:32) : Suatu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Akuntansi merupakan pemrosesan yang terdiri identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang dihasilkan dan diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah. Menurut I Gusti Agung Rai (2008:3) menyatakan sektor publik adalah sebagai berikut: Sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang/jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara lainnya, dimana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan.

Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknis dan analisis akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara. Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor : Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial , maupun pada proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Aset tetap adalah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan yang bersifat tetap, bukan untuk diperjual belikan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun untuk menjalankan aktivitas operasi yang bersifat permanen yaitu aset yang mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 (2010:169), dinyatakan bahwa : Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu metode penelitian lapangan (*Field work Reaserch*) dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara pada bagian sub bidang aset tetap mengenai analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara, dan penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*) yaitu dalam penelitian peneliti mengumpulkan dokumen, data dan arsip yang berhubungan dengan penelitian ini.

Obyek Penelitian dan Responden

Obyek dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Gedung Kembar B Lantai 2 Tenggarong Kutai Kartanegara. Responden dan diambil 3 orang yang berkompeten di bidangnya yaitu :

1. kapid aset daerah orang
2. Dua orang bagian sub bidang pemanfaatan aset daerah

Alat Analisis

1. PernyataanStandarAkuntansiPemerintah (PSAP) No. 07
2. Metode Komparatif penelitian yang sifatnya membandingkan antara pengelolaan aset tetap yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

3. Menggunakan rumus champion, yaitu dengan menghitung jumlah jawaban “Ada” kemudian dilaksanakan perhitungan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{\sum \text{Butir yang mendapat jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Butir yang dibandingkan}} \times 100\%$$

Table 1. Klasifikasi Kriteria

Persentase	Kriteria
Skor 0% - 25%	Dikategorikan tidak sesuai
Skor 26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai
Skor 60% - 75%	Dikategorikan cukup sesuai
Skor 76% - 100%	Dikategorikan sesuai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan nilai kriteria pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kelengkapan Checklist Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kutai Kartanegara Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07

No	Pos-Pos Aset Tetap		Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
	Pos-pos PSAP No.07	BPKAD Kutai Kartanegara			
1	Klasifikasi aset tetap:		√		
	a. Tanah	Tanah			
	b. Peralatan dan Mesin	Peralatan dan Mesin	√		
	c. Gedung dan Bangunan	Gedung dan Bangunan	√		
	d. Jalan, Irigasi dan jaringan	Jalan, Irigasi dan jaringan	√		
	e. Aset tetap lainnya	Aset Tetap lainnya	√		
	f. Kontruksi dalam pengerjaan	Kontruksi dalam pengerjaan	√		

2	Pengakuan Aset Tetap		√		
	a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.	Masa manfaat lebih dari 12 bulan	√		
	b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.	Dapat diukur secara andal	√		
	c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal	Tidak jual dalam operasi normal	√		
	d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Dibangun dalam maksud untuk digunakan	√		
3	Pengelolaan aset				
	a. Perencanaan kebutuhan	Perencanaan kebutuhan	√		
	b. Pengadaan	Pengadaan	√		
	c. Penggunaan dan Pemanfaatan	Penggunaan dan pemanfaatan	√		
	d. Pengamanan dan pemeliharaan dan rehabilitas	Pengamanan dan Pemeliharaan	√		
	e. Penghapusan dan Pemindahtangan	Penghapusan dan pemindahtangan	√		
4	Penilaian aset	Penilaian aset (dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtangan	√		
5	Komponen biaya:				
	a. Biaya persiapan tempat	Biaya persiapan tempat	√		
	b. Biaya pengiriman	Biaya pengiriman	√		
	c. Biaya professional seperti arsitek dan insinyur	Biaya professional seperti arsitek dan insinyur	√		

	d. Biaya pemasangan	Biaya pemasangan	√		
	e. Biaya konstruksi	Biaya konstruksi	√		
6	Aset Donasi(akta hibah)	Hibah	√		Dari sumbangan
7	Aset bersejarah				
	a. Bangunan bersejarah	Bangunan bersejarah (tugu Pembantaian kampung jawa sanga-sanga)	√		
	b. Monumen	Monumen (Monumen pancasila tenggarong)	√		
	c. Candi			√	Tidak ada
	d. Karya seni	Karya seni	√		
8	Pemanfaatan Aset Tetap:				
	a. Pinjam Pakai	Pinjam pakai	√		
	b. Sewa	Sewa	√		
	c. Bangun Guna Serah (BGS)			√	Belum menerapkan
	d. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)			√	Belum menerapkan
9	Pengukuran aset				
	a. Biaya langsung(biaya untuk tenaga kerja, biaya bahan baku)		√		Keperluan untuk pembangunan
	b. Biaya tidak langsung (biaya untuk tenaga kerja, biaya bahan baku)		√		Keperluan untuk pembangunan
10	Penyusutan				
	a. Metode garis lurus	Metode garis lurus	√		metode garis lurus perhitungannya mudah sehingga tidak mengganggu entitas

					akuntansi dalam perhitungan
	b. Metode unit produksi			√	
11	Aset militer			√	
12	Penghentian aset tetap				
	a. Menjual	Menjual (dengan cara lelang)	√		
	b. Menukar	Menukar	√		
	c. Penghapusan	Penghapusan	√		
39			34	5	

Butir yang dibandingkan = 39 Butir

Butir yang mendapat jawaban “sesuai” = 34 Butir

Butir yang mendapat jawaban “tidak sesuai” = 5 Butir

Hasil perhitungan kelengkapan checklist pengelolaan aset tetap sebagai berikut:

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{\sum \text{Butir yang mendapat jawaban "Sesuai"}}{\sum \text{Butir yang dibandingkan}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Relatif} = \frac{34(\text{Jawaban sesuai})}{39(\text{Jumlah butir yang dibandingkan})} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Relatif} = 0,871 \times 100\%$$

$$= 87,1\% \text{ Dikategorikan Sesuai}$$

Kelengkapan checklist pengelolaan aset tetap yang disajikan sebelumnya yaitu, pengelolaan aset tetap yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pengelolaan aset tetap yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai sebesar 87,1% yang masuk dalam persentase 76%-100% kriteria yang dikategorikan sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07, dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ditolak**, karena dapat dilihat di pengujian hipotesis bahwa hipotesis ditolak jika analisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kuta Kartanegara persentase 51% sampai dengan 100% dikategorikan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07.

Dilihat dari hasil perhitungan kelengkapan checklist aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sesuai pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara belum sepenuhnya maksimal karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara hanya menerapkan pinjam pakai dan sewa. Bangun Guna Serah (BGS) dan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) belum diterapkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara. Pelaksanaan siklus pemanfaatan telah sesuai namun belum semua bentuk pemanfaatan dilakukan hanya sebagian yang diterapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara. Adapun hasil penelitian terhadap Analisis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tentang aset tetap karena dilihat dari perbandingan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 dengan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara. dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah “sesuai” dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07. dimana nilai perbandingan yaitu, 39 yang mendapat jawaban “sesuai” dengan butir yang dibandingkan yaitu 34, dengan hasil akhir 87,1% yang masuk dalam persentase 76%-100% kriteria yang dikategorikan sesuai berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 yang termasuk dalam kategori “sesuai”. Berarti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sudah menjalankan sesuai yang tertuang pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07.
2. **Hipotesis ditolak** karena Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara persentase 87,1% dikategorikan sudah “sesuai” dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tentang

aset tetap.

3. Pengelolaan Aset tetap/Barang Milik Daerah (BMD) yang dilakukan oleh bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tentang aset tetap tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti, pemanfaatan yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara hanya sebatas sewa dan pinjam pakai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara dapat dikatakan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07, namun pemanfaatannya belum berjalan dengan maksimal. Sebaiknya bangunan dan gedung yang tidak diperlukan sehingga tidak adanya pemborosan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan pemanfaatannya seharusnya bisa menerapkan semuanya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara hanya menerapkan sewa dan pinjam pakai seharusnya diterapkan semua yaitu Sewa, Pinjam Pakai, Bangun Guna Serah dan Kerja Sama Pemanfaatan agar bisa lebih maksimal lagi.

REFERENCE

- Anonim, 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07. *Akuntansi Aset Tetap*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta :Salemba Empat.
- Rai Agung I Gusti. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.